



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 6/KPN/SK.OT.1.2/I/2024

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- .Menimbang : a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Bantul untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul
- c. Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana berdasarkan pada kompetensi penugasan (Hakim Pengawas Bidang) dan jabatan yang berkaitan
- d. Bahwa adanya promosi dan mutasi hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bantul maka susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk diperbarui;
- e. Bahwa pejabat-pejabat yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

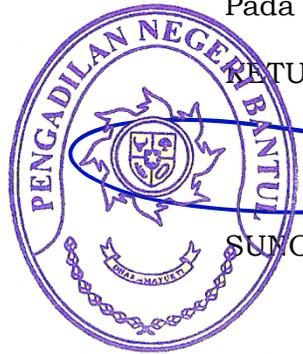
7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI / WISAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul Nomor 95/KPN/SK.OT.1.2/XII/2024 tentang Penunjukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wisayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Negeri Bantul
- KEDUA : Menetapkan dan menunjuk pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wisayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Bantul adalah:
  - a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
  - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
  - c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul; Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Bantul
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

KEENAM : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 2 Januari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

SUYOTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : 6/KPN/SK.OT.1.2/1/2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Pembina	KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL SUNOTO, S.H.,M.H
Ketua	WAKIL KETUA KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum
Koordinator Teknikal	PANITERA PENGADILAN NEGERI BANTUL SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H.
Koordinator Operasional	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak

<b>AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS PIDANA DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.
Sekretraris	BASKARA NABLA PUTRA, S.H HENDRI WIJAYA, S.H
Anggota	PANITERA MUDA PIDANA : DARU BUANA SEJATI, S.H
	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. LAILA KIRFAH, S.H. MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. SUYATINI ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B WAWAN ARI PRABOWO

<b>AREA II</b> <b>PENATAAN TATA LAKSANA</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG PERDATA EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.
Sekretaris	ZHRATUSHALIHAN, A.Md.M ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H
Anggota	PANITERA MUDA PERDATA : ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H
	DIYAH PRAMASTUTI, S.H. SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H. JANARTO, S.H. SURADAL CAHYA MULYANTO, S.H IKA HEPSYAWATI, SE SATRIA PINANDITA, S.E

<b>AREA III</b> <b>PENATAAN SDM APARATUR</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS KEPEGAWAIAN, ORTALA SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H
Sekretaris	ASIANI LAKOBI, S.E.,S.H
Anggota	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA ARIEF NOOR RAHMAN
	ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H. AGUS NUR ISRIYADI, S.H. ACHILLIA BUDI PRATIWI, S.Pd MEY LINA SELISTIAWATI, S.E

<b>AREA IV</b> <b>PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.
Sekretaris	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN: PRASETYO, S.T.
	YOHANES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md SITI SOLIKHAH, S.H ANA RATNAWATI MOHAMMAD JAZURI DWI ANGGORO

<b>AREA V</b> <b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG HUKUM: DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.M.Hum
Sekretaris	WIDODO BUDI SANTOSO, S.H. DIAH PRAVITASIWI, S.H
Anggota	PANITERA MUDA HUKUM : RETNO PRABANDARI, S.H.M.Kn
	ARIEF SETYO WIBOWO, S.H. ANJAR DWIYANTO, S.H PRASETYA SUJADI, S.H. SUPRIYADI DIYAN RAHMAWATI

<b>AREA VI</b> <b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS PERENCANAAN , TI DAN PELAPORAN GATOT RAHARJO, S.H.M.H
Sekretaris	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P FADHILA FATHUL JANNAH, S.E.I
Anggota	AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H ENY KISDARYANTI, S.E., S.H. SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H. HENDRA ANDREA, A.Md SUMARDIYONO SAPTA WIDADA NANANG NUGROHO MUHAMAD HARIYADI



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

SUNOTO